



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 14 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pendalaman Pembahasan RKA K/L TA 2021. 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 50 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sekretaris Jenderal, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial, Inspektur Jenderal, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Ketua , H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas

Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, dan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI dengan agenda “**Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2021, Isu-isu Aktual dan Solusinya**” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar Rp92.817.590.291.000,- (*Sembilan Puluh Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan rincian berdasarkan unit kerja dan program sebagai berikut:

UNIT ORGANISASI		
PROGRAM		ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL		2,159,314,886,000
1.	Program Perlindungan Sosial	1,355,917,176,000
2.	Program Dukungan Manajemen	803,397,710,000
DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN		57,256,152,505,000
1.	Program Perlindungan Sosial	56,580,000,000,000
2.	Program Dukungan Manajemen	600,172,505,000
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		30,993,505,300,000
1.	Program Perlindungan Sosial	30,893,292,800,000
2.	Program Dukungan Manajemen	100,212,500,000
DITJEN REHABILITASI SOSIAL		1,517,485,787,000
1.	Program Perlindungan Sosial	991,558,772,000
2.	Program Dukungan Manajemen	525,927.015.000

DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL		456,207,360,000
1.	Program Perlindungan Sosial	403,868,545,000
2.	Program Dukungan Manajemen	52,338,815,000
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL		391,515,950,000
1.	Program Perlindungan Sosial	216,331,573,000
2.	Program Dukungan Manajemen	175,184,377,000
INSPEKTUR JENDERAL		43.408.503.000
1.	Program Dukungan Manajemen	43.408.503.000
TOTAL		92,817,590,291,000

2. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- Penguatan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terintegrasi, terencana dan dukungan sistem yang memadai.
 - Meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan program perlindungan dan bantuan sosial dalam rangka menangani dampak sosial dari pandemi Covid-19.
 - Penguatan program kewirausahaan sosial dan puskesmas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
 - Penguatan tenaga pendamping program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di daerah.
 - Memastikan siswa pendidikan di pesantren sebagai komponen penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
 - Penguatan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) yang dilaksanakan di di UPT Kemensos/Pemerintah Daerah dan panti-panti sosial masyarakat.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si